

## **KIPRAH POLITIK PURNAWIRAWAN (Studi Tentang Strategi Politik Pemenangan Calon Legislatif Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif di Kota Banjar Tahun 2019)**

**Teguh Anggoro<sup>1</sup>, Tina Cahya Mulyatin<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Bina Putera Banjar  
<sup>1</sup>[goeh\\_an77@yahoo.co.id](mailto:goeh_an77@yahoo.co.id)  
<sup>2</sup>[tinacahya@gmail.com](mailto:tinacahya@gmail.com)

Diterima: 29 Oktober 2019 Disetujui: 6 Januari 2020 Dipublikasikan: 2 Maret 2020

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by a number of retired TNI members who are candidates for the Regional Parliament of Banjar City, West Java. This research tries to answer (1) What motivates retired TNI personnel into politics, (2) How is the strategy carried out by TNI Retired Candidates in winning the legislative elections in Banjar City in 2019, this study uses qualitative methods, with a phenomenological study approach that is a study that seeks looking for the "essence" of the meaning of a phenomenon. Data collection is done through in-depth interviews, observation, documentation studies and literature studies. The informants in this study were retired TNI, elite and cadres of PDIP, Golkar, Gerindra and the United Nations in Banjar City. This study explains that there are three factors that cause retirement to enter the local political arena: First, the dynamics of local politics; second, retired internal factors; third, political party recruitment factors are poor. This study explains the strategy carried out by retired officers in winning the legislative election with a pattern of iteration clientelism and personalistic clientelism, the choice of the pattern because retired officers have a strong network formed while serving in the military, and the network building is very sturdy because the formation process is long. This pattern is also carried out because it is very effective in socializing themselves. In addition it can minimize political costs. This research concludes that the inclusion of retired military officers in local politics has nothing to do with their previous military agencies, but retired officers use the power of networks that they had made while in the military as their strength and winning strategy.*

**Keywords:** *Clientelism, Elections, Patronage, Retired.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa purnawiran TNI yang menjadi Caleg DPRD Kota Banjar, Jawa Barat. Penelitian ini mencoba menjawab (1) Apa motivasi purnawirawan TNI masuk dalam Politik, (2) Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Caleg Purnawirawan TNI dalam memenangkan pemilu legislatif di Kota Banjar tahun 2019, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi fenomenologi yaitu studi yang berusaha mencari "esensi" makna dari suatu fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah purnawirawan TNI, elit dan kader PDIP, Golkar, Gerindra dan PBB di Kota Banjar. Penelitian ini menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan masuknya purnawirawan dalam kancah

politik lokal : Pertama, Dinamika politik lokal; kedua, faktor internal purnawirawan; ketiga, faktor Rekrutmen politik Parpol yang buruk. Penelitian ini menjelaskan strategi yang dilakukan oleh purnawirawan dalam memenangkan Pileg dengan pola klientelisme iterasi dan klientelisme personalistik, pilihan pada pola tersebut karena purnawirawan memiliki jaringan kuat yang terbentuk saat bertugas di militer, dan bangunan jaringannya sangat kokoh karena proses pembentukannya lama. Pola ini juga dilakukan karena sangat efektif dalam mensosialisasikan diri. Selain itu dapat meminimalisir biaya politik. penelitian ini menyimpulkan bahwa masuknya purnawirawan dalam politik lokal tidak ada hubungannya dengan instansi militernya sebelumnya, akan tetapi purnawirawan menggunakan kekuatan jaringan yang pernah dibuatnya saat di militer sebagai kekuatan dan strategi pemenangannya.

**Kata Kunci** : Klientelisme, Patronase, Pemilu, Purnawirawan.

## PENDAHULUAN

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin membaik, indikatornya adalah dilaksanakannya pemilihan umum secara kontinyu, bersih dan aman. Tahun 2018 dan 2019 dikatakan sebagai tahun politik di mana pada tahun 2018 dilaksanakan pilukada secara serentak dan pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan.

Menghadapi kondisi demikian maka diperlukan strategi bagi para calon anggota legislatif dalam memenangkan pemilihan tersebut. Para calon kandidat legislatif berlomba dengan caranya masing-masing untuk memenangkan kursi anggota legislatif.

Adanya strategi merupakan kunci kemenangan seorang calon atau kandidat dan merupakan peranan penting dalam kemenangan tersebut. Keberhasilan untuk memenangkan pemilihan umum legislatif tidak bisa lepas dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga upaya melakukan persuasi terhadap masyarakat pemilih harus terus dilakukan, yang pada akhirnya memberikan dukungan suaranya untuk memilihnya. Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal ini imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik menjadi lebih berdinamika, hingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.

Strategi dalam menghadapi pemilihan langsung merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim pemenangan yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh calon legislatif atau kandidat dan tim pemenangan dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada calon atau kandidat tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana calon atau kandidat dan tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan.

Lembaga Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan badan yang bersifat plural dengan keanggotaan yang lebih banyak daripada lembaga eksekutif, dan menawarkan kemungkinan baik perwakilan sekaligus jumlah keberagaman dalam politik, dan untuk menjembatani hubungan yang lebih dekat antara wakil dan pemilihnya. Keberagaman yang diwakili dalam lembaga legislatif mungkin didefinisikan sepanjang garis kolektif, itulah, perwakilan mengoperasikan melalui kelompok-kelompok

politisi yang dipilih dalam “tim” untuk mempresentasikan sejumlah rangkaian kepentingan. Aturan yang berkaitan dengan perwakilan kolektif dipilih, pada gilirannya, harus mengidentifikasi seperangkat prinsip yang mendefinisikan kepentingan, seperti lokasi geografis, ras, etnisitas, gender, bahasa, agama dan sebagainya.

Walaupun Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 masih jauh akan tetapi para calon yang berasal dari Purnawirawan TNI sudah membuat strategi untuk kemenangan dirinya agar masuk dalam DPRD tahun 2019. Ibarat perang, maka ada strategi yang akan dilakukan untuk memenangkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Peltu Purn Kasnap (Calon Anggota Legislatif partai Gerindra )

“Kita akan menggunakan strategi dalam memenangkan pileg DPRD Kota Banjar 2019, masa kampanye merupakan area peperangan untuk memenangkan suara rakyat sehingga diperlukan strategi dalam kemenangannya” (Wawancara tanggal 9 Agustus 2018)

Di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat terdapat 4 orang mantan Purnawirawan TNI yang akan ikut dalam pemilu Legislatif tahun 2019 untuk dapat duduk di DPRD Kota Banjar. Mereka berasal dari partai yang berbeda dan daerah pemilihan yang berbeda pula.

Tabel 1.1  
Calon Legislatif DPRD Kota Banjar Jawa Barat

No	Nama	Asal partai	Daerah Pemilihan
1	Peltu (Purn) Kasnap	Partai Gerindra	Kec Banjar&Purwahaerja
2	Pelda (Purn) Dalijo,S.IP.,M.Si	PDIP	Kec Pataruman
3	Serma (Purn) Gunadi	PBB	Kec Pataruman
4	Peltu (Purn) Sudarto	Golkar	Kec Langensari

Sumber : KPUD Kota Banjar 2018

Ke empat Purnawirawan yang merupakan Caleg DPRD Kota Banjar sudah jauh hari mempersiapkan diri untuk mengikuti Legislatif Pemilu 2019. Mereka adalah mantan anggota dari Kodim 0613/Ciamis yang menduduki jabatan sebagai Bintara Intelijen dan Babinsa. Dengan berbekal sebagai mantan aparat intelijen dan Babinsa mereka penuh percaya diri mendaftarkan diri ke partai politik setelah mereka pensiun. Ini merupakan salah satu strategi dari Partai Politik dalam mendulang suara, di mana mengambil Caleg yang sudah memiliki modal Sosial (*Sosial Capital*). Seorang Babinsa sudah dapat dipastikan memiliki kedekatan dengan masyarakat dikarenakan dalam keseharian tugasnya berada di tengah masyarakat untuk menyiapkan wilayahnya sehingga dapat dijadikan sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Masuknya purnawirawan militer ke dalam politik juga terjadi di negara-negara lain dengan tujuan untuk dapat memengaruhi kebijakan politik (lihat Becker 2001:6; Janowitz 1960:388). Untuk kasus Indonesia, dapat dikatakan masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik salah satunya disebabkan oleh lemahnya institusi kepartaian serta inkompetensi politisi sipil.

Politisi sipil mendorong politisi purnawirawan TNI untuk menerapkan kapabilitasnya dalam bidang militer, seperti penguasaan teritorial, untuk menggerakkan mesin partai. Dengan kata lain, lemahnya infrastruktur demokrasi telah mendorong purnawirawan TNI untuk memanfaatkan keahlian strategi militernya dalam rutinitas politik (*daily politics*). Di samping itu, aspek lain yang menjadi mediator yang dapat menjelaskan masuknya

purnawirawan TNI ke dalam politik, antara lain pembentukan karakter TNI, Dwifungsi ABRI, purnawirawan TNI sebagai warga sipil, organisasi purnawirawan TNI, usia pensiun, orientasi kekuasaan, dan kegiatan pasca pensiun purnawirawan TNI.

Di satu sisi, hal ini baik karena dari segi manajemen berarti ada upaya untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini. Namun, di sisi lain, bisa menjadi ancaman laten terhadap demokrasi bila “pihak yang dianggap dekat dengan militer” dilibatkan dalam jalannya rutinitas politik. Dalam menjalankan kinerja politiknya purnawirawan TNI menunjukkan perilaku yang berada dalam koridor demokrasi dan tidak bersikap antipati terhadap demokrasi. Artikel ini berargumentasi bahwa para purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik memiliki pengaruh positif terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini terutama karena politisi purnawirawan TNI menganut politik negara yang memegang teguh NKRI, Pancasila, dan konstitusi (UUD 1945), dengan salah satu implementasinya adalah upaya untuk menegakkan konstitusi sebagai satu-satunya aturan yang sah (*the only game in town*).

Urgensi permasalahannya dapat dikatakan masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem rekrutmen partai, serta inkompetensi politisi sipil. Selain itu politisi sipil memiliki anggapan purnawirawan memiliki jaringan dan modal Sosial (*Sosial Capital*) Marijan (2010), sehingga partai politik mengambil langkah pragmatis merekrutnya. Politisi sipil mendorong politisi purnawirawan TNI untuk menerapkan kapabilitasnya dalam bidang militer, seperti penguasaan teritorial, kemampuan agitasi, kepemilikan klien saat berdinam yang kesemuanya bila dimaksimalkan maka akan berguna untuk mendulang suara dalam pemilu.

Sejauh ini studi mengenai strategi politik dalam pemilu legislatif telah dilakukan akan tetapi sebagian besar berfokus pada dua aspek, yaitu aspek partai politik dan aspek personal. *Pertama*, pada aspek strategi partai politik untuk kemenangan pemilu, seperti pada penelitian (Azwar 2015; Mahmud, 2018). *Kedua*, strategi personal dalam memenangkan pemilu legislatif (lihat penelitian; Kurzman, 2008; Muno, 2010; Stokes, 2013; Aspinall dan Sukmajati 2015, Mubin, 2015; Alam, 2016; Setiawan, 2017 ). Penelitian strategi perorangan dalam kemenangan pemilu banyak terkonsentrasi pada pembentukan tim sukses, kampanye, dan klientelisme. Penelitian yang akan dibuat peneliti masuk pada kelompok strategi perorangan dalam memenangkan pemilu legislatif, tetapi akan difokuskan pada klientelisme personalistik (Muno, 2010).

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya. *Pertama*, peneliti berpendapat masih sedikit penelitian politik yang berfokus pada masuknya purnawirawan dalam politik, dan motivasi purnawirawan TNI masuk dalam kancah politik. *Kedua*, peneliti berpendapat bahwa masih sedikit penelitian yang mengkaji strategi politik yang dilakukan oleh purnawirawan TNI pada kemenangan pemilu legislatif. *Ketiga*, penelitian ini mengupas strategi kemenangan pemilu legislatif dilihat dari aspek personal klientelisme (Muno 2010). Dengan demikian penelitian ini berusaha mengisi celah yang kosong pada strategi politik dalam memenangkan pemilu.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategia*” yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005), konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intens to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk merealisasi tujuan politik. menurut Clausewit dalam Schroder dalam Nursal (2004 : 5) berpendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. jika melihat saat ini penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada seni seorang jenderal dalam peperangan, akan tetapi sudah banyak digunakan di dalam semua bidang ke ilmunan. Dengan pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau untuk mendapatkan/mencapai tujuan.

Stretegi berasal dari kata *strategia* yang memiliki konotasi pengertian sebagai suatu seni (*art*) dan ilmu (*science*) tentang pengendalian militer. Strategi politik menjadi hal yang penting, baik bagi partai politik atau organisasi non partai politik, atau bagi perseorangan. Strategi politik juga dapat diartikan sebagai seperangkat metode yang digunakan untuk memenangkan pertarungan antara kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan melalui pemilu. Menurut Schroder (2013 : 5) dalam buku strategi politik menjelaskan bahwa dalam strategi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.

Secara terminologi, strategi dapat diartikan sebagai ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Tim Prima Pena, 2006:448). Menarik jika kita tautkan dengan istilah politik yang oleh Lasswell disimpulkan sebagai masalah *who gets what, when, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Artinya, ada suatu usaha dan strategi dalam suatu proses politik mengenai “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana” (Surbakti, 1992:7)

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep strategi politik dari Peter Schroder bahwa dalam strategi politik terdapat keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.

Secara harfiah istilah klientelisme berasal dari kata “*cluere*” yang artinya adalah “mendengarkan atau mematuhi”. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara “*clientela*” dan “*patronus*”. “*Clientela*” pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut “*patronus*”, yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa “*clientela*” merupakan pengikut setia dari “*patronus*”. (Muno: 2010)

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen iterasi, *status inequality* dan resiprokal. (Tomsa and Andreas Ufen : 2012) Kemudian, klientelisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Maka dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Dari pendapat ahli ini dapat diketahui bahwa klientelisme memiliki beberapa elemen kunci.

Dari pendapat ahli ini dapat diketahui bahwa klientelisme memiliki beberapa elemen kunci. Tiga elemen klientelisme yaitu *iterasi, asimetri, dan resiprositas*. (Tomsa dan Ufen : 2012) Selain itu, menurut ahli lain empat komponen klientelisme yaitu *personalistik,*

*resiprositas, hirarki dan iterasi.* (Aspinal 2015) Namun dari dua ahli tersebut, setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa klientelisme memiliki empat elemen karakteristik: iterasi, asimetris, resiprositas dan personalistik.

Asimetris dapat dilihat dari posisi Patron yang memiliki status lebih tinggi, sedangkan klien adalah orang dengan status yang lebih rendah. Resiprositas dapat diartikan meskipun status antara patron dan klien tidak setara, namun pada prinsipnya kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari ikatan klientelistik yang terjalin. Iterasi artinya terdapat interaksi yang terjadi secara berulang-ulang. Atau dengan kata lain, interaksi antara patron dan klien tidak hanya berlangsung selama satu kali. Proses ini biasanya melibatkan interaksi dalam ikatan sosial yang relatif stabil dan dalam waktu tertentu. (Tomsa dan Ufen : 2012)

Sedangkan Personalistik, artinya, klientelisme selalu terjadi dalam relasi personal di mana patron dan klien memiliki hubungan tertentu. Misalnya hubungan bisnis, hubungan pertemanan, hubungan politik dan lain sebagainya. Sehingga patron dan klien akan saling tahu satu sama lain. Ini akan mengakibatkan adanya *endurance* atau ketahanan dari aktivitas klientelistik dalam waktu yang lama. (Muno : 2010). Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Iterasi (Tomsa dan Ufen : 2012) serta Personalistik (Muno : 2010) dalam mengupas tentang strategi politik.

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah: (1) Apa motivasi purnawirawan TNI masuk dalam Politik; (2) Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Caleg Purnawirawan TNI dalam memenangkan pemilu legislatif di Kota Banjar tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Purnawirawan TNI dan langkah langkah yang digunakan untuk dapat melenggang pada DPRD Kota Banjar tahun 2019.

## **METODE**

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat, Abercrombie (1984 : 172). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data, Creswell ( 2007:2). Adapun fokus penelitian ini adalah pada strategi yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI untuk memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Banjar.

Unit analisis dalam penelitian ini ialah Kelompok yaitu partai Golkar, PDIP, PBB dan Partai Gerindra. kedua ialah individu yaitu mantan purnawirawan TNI yang menjadi calon anggota legislatif pada pemilu legislatif di Kota Banjar tahun 2019. Informan dalam penelitian ini adalah Caleg Purnawirawan TNI yang ikut dalam pemilu 2019. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *snowball Method* (Taylor et al, 2016 : 47). Berdasarkan rekomendasi informan pangkal yakni Dalijo sebagai key informan, yang merupakan caleg dari PDIP yang merupakan purnawirawan TNI. Staf DPC PDIP, DPD Golkar, DPD Gerindra dan DPC PBB Kota Banjar, di mana di dalam partai tersebut Caleg purnawirawan TNI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut: Wawancara mendalam (*In-depth Interview*), Observasi, dan Studi Kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Purnawirawan Dalam Politik Lokal

Purnawirawan dalam kancah politik Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Masuknya para purnawirawan dalam politik di Indonesia sudah dimulai dari sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Ada yang berkiprah di parlemen dan ada juga yang berkiprah di eksekutif. Di Amerika Serikat, Presiden Jenderal Dwight D. Eisenhower pernah berseru “*Old soldiers never die, they just fade away*” (Mantan prajurit tak pernah mati, mereka hanya menghilang saja)<sup>1</sup>. Di Indonesia, mereka justru tidak akan menghilang begitu saja, karena sebagian ada yang melanjutkan eksistensinya pada kehidupan politik.

Pendapat yang tidak menyetujui purnawirawan militer masuk politik praktis menganggap bahwa sampai kapan pun seorang purnawirawan militer tetaplah militer dengan jati dirinya sebagai pembela negara dan bertindak untuk semua. Posisi demikian harus selamanya dijaga demi kehormatan seorang tentara yang memang sedari awal jiwa dan raganya telah disiapkan untuk membela bangsa dan negara.

Para purnawirawan dalam politik, sebut saja pada masa “Orde Baru” ada Wiranto, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudoyono, Hendropriyono dan lain sebagainya. Sedangkan pada tingkat lokal ada T.B Hasanudin dari PDIP, ada Edy Rahmayadi dari Partai Gerindra dan lain sebagainya. Masuknya purnawirawan dalam militer tidaklah menjadi larangan karena mereka sudah menjadi warga sipil, sehingga mereka memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih. Berbeda dengan militer di mana sampai dengan saat ini hak politik tidak diberikan baik untuk memilih atau dipilih.

Hanya saja fenomena yang dikhawatirkan dengan masuknya purnawirawan dalam politik adalah, pada saat kontestasi pemilu dikhawatirkan adanya mobilisasi militer aktif untuk membantu pendulangan suara. Apalagi purnawirawan tersebut merupakan mantan seorang komandan, sehingga terbuka akses untuk menggerakkan mantan prajuritnya. Walaupun di sampaikan oleh Panglima TNI bahwa TNI akan netral dalam setiap Pemilu dan akan menindak tegas bila ada prajurit yang ketahuan tidak netral<sup>2</sup>. Pernyataan ini pun dipertegas dengan pemasangan pamflet oleh seluruh satuan TNI di seluruh Indonesia tentang “Netralitas TNI”. Setidaknya ini menjadi komitmen TNI untuk mendukung jalannya demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya apa yang menyebabkan purnawirawan masuk dalam perpolitikan baik pada tingkat lokal ataupun nasional. Soesilo (2014) menyatakan bahwa bahwa keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik praktis lebih didasarkan pada komitmen terhadap konstitusi dalam membangun konsolidasi demokrasi, yang mana bukan mewakili kepentingan militer. Argumentasi ini merupakan kritik terhadap beberapa studi sebelumnya yang mengemukakan bahwa masuknya purnawirawan TNI ke dalam politik merupakan bagian dari upaya institusi militer menguasai pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, atau disebut juga sebagai remiliterisasi.<sup>3</sup>

Berbeda dengan pandangan Soesilo (2014), motivasi masuknya purnawirawan militer dalam kancah politik lokal di Kota Banjar Jawa Barat jika menggunakan pendekatan dari

---

<sup>1</sup>Lihat di, *Ketika Para Jenderal Purnawirawan Gerah Terhadap demokrasi*, <https://indoprogress.com/2019/06/ketika-para-jenderal-purnawirawan-gerah-terhadap-demokrasi/> di unduh pada 1 september 2019.

<sup>2</sup>Marsekal Hadi tegaskan Netralitas TNI dalam Pemilu, lihat di <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/ppojn2428/marsekal-hadi-tegaskan-netralitas-tni-dalam-pemilu> di unduh 1 September 2019

<sup>3</sup>Arie S. Soesilo. Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Labsosio FISIP-UI, Vol 19, No 2 (2014), 195-230.

Maslow (1994)<sup>4</sup> motivasi, dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi *intrinsik*) maupun dari luar individu (motivasi *ekstrinsik*). .

Ada tiga faktor yang menyebabkan masuknya purnawirawan dalam kancah politik lokal : *Pertama*, Dinamika politik lokal, di mana selama 15 tahun berdirinya Kota Banjar Jawa Barat, terjadi dinasti politik. Pusaran kekuasaan hanya dikuasai oleh satu keluarga<sup>5</sup>. Perpolitikan menjadi tidak sehat karena praktek politik menjadi oligarki. Kondisi ini memunculkan keinginan dari sebagian purnawirawan untuk ikut merubah perpolitikan lokal, sehingga beberapa purnawirawan mengambil langkah bergabung dalam partai politik.

*Kedua*, Faktor internal purnawirawan, terbagi dua (1) Tugas saat aktif di militer turut menyumbangkan motivasi untuk bergabung dalam politik lokal. Para purnawirawan yang dahulu pernah bertugas di satuan teritorial justru membuka wawasan mereka dan semakin mengetahui tentang dinamika pemerintah daerah. Mengapa demikian karena sehari-hari mereka bersentuhan dengan masyarakat dan terkadang dengan Pemerintah Daerah.<sup>6</sup> (2) Faktor Ekonomi, faktor untuk meningkatkan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan untuk masuk dalam partai politik, dan bertarung dalam pemilu legislatif. Setelah pensiun dalam militer, pendapatan ekonomi keluarga berkurang, sehingga memunculkan keinginan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan masuk kancah politik praktis, untuk menjadi legislatif di daerah<sup>7</sup>.

*Ketiga*, Rekrutmen politik Parpol yang buruk, Tidak berjalannya rekrutmen politik oleh partai politik di daerah menyebabkan parpol berlomba untuk mencari kader secara instan untuk diajak bergabung dan menjadi calon legislatif dari partai. Ibarat gayung bersambut di mana partai mencari kader untuk maju dalam pemilu legislatif dan ada purnawirawan yang mencari “perahu” untuk maju dalam pileg.

Para purnawirawan TNI bergabung dengan partai politik di Kota Banjar sekitar tahun 2017 dan 2018 menjelang pemilu legislatif tahun 2019. Artinya belum lama setelah pensiun mereka bergabung dalam partai politik. semenjak masuk parpol, mereka langsung mendapatkan tawaran untuk menjadi calon legislatif, dengan alasan untuk memenuhi quota jumlah Caleg di daerah pemilihan.

Masuknya purnawirawan dalam politik sangat dipengaruhi oleh masa saat berdinis. Para purnawirawan yang berdinis di satuan teritorial mengharuskan meleak akan kondisi politik lokal. Ini merupakan kondisi awal, dan kondisi ini semakin diperkuat oleh buruknya sistem rekrutmen partai politik dalam mencari kader yang akan menduduki kursi legislatif, bak gayung bersambut akhirnya kondisi ini mempertemukan purnawirawan dengan partai politik yang dilanjutkan dengan terekrutnya mereka. Motivasi purnawirawan masuk ke dalam politik di tingkat lokal dikarenakan faktor internal purnawirawan. Motivasi tersebut semakin kuat setelah ada tawaran dari partai politik untuk bergabung dalam partai.

### **Strategi Purnawirawan Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif Di Kota Banjar 2019.**

Untuk menjelaskan strategi dari para purnawirawan TNI di Kota Banjar dalam memenangkan pemilu legislatif adalah menggunakan pendekatan dari Schroder (2013 : 5) dalam buku strategi politik menjelaskan bahwa dalam strategi politik adalah keseluruhan

---

<sup>4</sup> Abraham H. Maslow. 1994. Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia). PT PBP, Jakarta.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Dalijo, Purnawirawan TNI Caleg PDIP Kota Banjar, di Banjar tanggal 24 Juli 2019.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Dalijo, Purnawirawan TNI Caleg PDIP Kota Banjar, di Banjar tanggal 24 Juli 2019.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Kasnap, Purnawirawan TNI Caleg Gerindra Kota Banjar, di Banjar, tanggal 3 Juli 2019.

keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masing-masing Caleg yang berasal dari purnawirawan TNI, memiliki strategi sendiri untuk dapat memenangkan pemilu legislatif. Bagaimana strategi yang dilakukan para purnawirawan ternyata mereka menggunakan pola klientelisme, pola yang hampir sama dilakukan oleh para politisi sipil lainnya. klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara di mana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Bagaimana para purnawirawan menjalankan pola klientelisme, ternyata mereka menggunakan jaringan lama/teman lama saat mereka bertugas sebagai Babinsa dan aparat intelijen di satuan teritorial dan ini sangat efektif mengingat pola hubungan yang dibangun saat berdinastis tidak ditinggalkan, dan tetap dirawat<sup>8</sup>.

Bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan aparat intelijen mengharuskan seorang prajurit untuk berada di tengah masyarakat. Kegiatan sehari-hari adalah membantu masyarakat dan menciptakan kondisi daerah binaan menjadi ruang juang, alat juang dan kondisi juang ke depannya. Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadikan Babinsa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat, sehingga secara tidak langsung terbentuklah jaringan yang kuat di daerah binaannya. Jaringan tersebut semakin besar karena adanya interaksi secara terus menerus di berbagai daerah di mana purnawirawan pernah bertugas dan bertempat tinggal<sup>9</sup>.

Komunikasi yang baik dan tetap terjaga membuat hubungan baik antara purnawirawan dan masyarakat. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menyatakan sudah seperti keluarga karena hubungan emosional yang terbentuk. Hubungan purnawirawan dan masyarakat terbentuk lama saat bertugas, terkadang melebihi seperti keluarga, karena ada pola memberi dan menerima di antara mereka ketika bertugas. Anggoro (2019)<sup>10</sup>.

Pada saat purnawirawan bergabung dengan partai politik dan menyatakan untuk maju dalam pemilu legislatif, tidaklah sulit untuk mensosialisasikan diri. Dia menyampaikan kepada rekan-rekannya dan masyarakat yang memiliki hubungan yang dekat dengannya tentang keinginan untuk maju menjadi calon legislatif. Pola ini hampir dilakukan oleh semua purnawirawan dengan menggunakan semacam jaringannya yang dahulu pernah dibentuk. Beberapa tokoh masyarakat di daerah dijadikan sebagai tim sukses untuk pemenangannya. Dari 10 ketua tim sukses ada sekitar 6 yang merupakan masyarakat binaannya saat bertugas<sup>11</sup>.

Pola ini merupakan pola klientelisme di mana terbentuk jaringan dan relasi. Jaringan dan relasi yang dibentuk berdasarkan pada pola hubungan pertemanan saat berdinastis, sehingga tidaklah sulit untuk mensosialisasikan diri, karena jaring yang dibutuhkan sudah ada sebelumnya. Interaksi dengan masyarakat terjadi berulang-ulang dan tidak satu kali, sehingga memiliki kekuatan yang kuat. Pola ini disebut juga dengan iterasi (Tomsa dan Ufen : 2012)

Iterasi artinya terdapat interaksi yang terjadi secara berulang-ulang. Atau dengan kata lain, interaksi antara patron dan klien tidak hanya berlangsung selama satu kali. Proses ini biasanya melibatkan interaksi dalam ikatan sosial yang relatif stabil dan dalam waktu tertentu. Strategi pemenangan pemilu purnawirawan salah satunya dilakukan melalui pola klientelisme iterasi yang terbentuk sejak dia berdinastis di TNI.

---

<sup>8</sup>Teguh Anggoro. *Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No 1 (2019)

<sup>9</sup>Wawancara dengan Gunadi, Purnawirawan TNI Caleg Kota Banjar, di Banjar, tanggal 2 Juli 2019

<sup>10</sup>Teguh Anggoro ...Ibid 2019

<sup>11</sup>Wawancara dengan Gunadi, Purnawirawan TNI Caleg Kota Banjar, di Banjar, tanggal 2 Juli 2019

Selain penggunaan pola di atas, pola lain juga di dilakukan yaitu dengan pendekatan klientelisme personalistik. Di mana purnawirawan menjadikan tokoh masyarakat di daerah untuk dijadikan tim sukses. Beberapa tokoh masyarakat yang di pilih adalah masyarakat yang memiliki hubungan kedekatan dengannya saat bertugas di militer. Hubungan pertemanan yang sudah lama terbentuk membuat hubungan mereka seperti keluarga, dan memiliki *endurance* atau ketahanan dari aktivitas klientelistik dalam waktu yang lama. Ini memudahkan dalam pembentukan tim sukses dalam pemenangannya.

Pola klientelisme iterasi dan personalistik dipilih oleh para purnawirawan adalah dikarenakan, mereka sudah memiliki jaringan yang terbentuk saat bertugas di militer, dan bangunan jaringannya kokoh karena terbentuk lama. Pola ini juga dilakukan karena sangat efektif dalam mensosialisasikan diri. Selain itu dapat meminimalisir biaya politik.

Atas dasar kemampuan membentuk jaringan yang luas saat bertugas membuat partai politik dan elit di daerah sangat tertarik untuk merekrut para purnawirawan. Purnawirawan memiliki modal sosial yang cukup kuat sehingga akan berdampak positif bagi partai yang merekrutnya. Hal inilah yang menjadi landaan bagi parpol di daerah untuk merekrut purnawirawan TNI dan menjadikannya sebagai calon legislatif pada pemilu 2019.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan ada tiga faktor yang menyebabkan masuknya purnawirawan dalam kancah politik lokal: *Pertama*, Dinamika politik lokal ; *kedua*, faktor internal purnawirawan, terbagi dua (1) Tugas saat aktif di militer turut menyumbangkan motivasi untuk bergabung dalam politik lokal. (2) Faktor Ekonomi, faktor untuk meningkatkan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan untuk masuk dalam partai politik, dan bertarung dalam pemilu legislatif. *Ketiga* Rekrutmen politik partai politik yang buruk, Tidak berjalannya rekrutmen politik oleh partai politik di daerah menyebabkan parpol berlomba untuk mencari kader secara instan untuk diajak bergabung dan menjadi calon legislatif dari partai. Motivasi purnawirawan masuk ke dalam politik di tingkat lokal dikarenakan faktor internal purnawirawan.

Motivasi tersebut semakin kuat setelah ada tawaran dari elit partai politik untuk bergabung dalam partainya. Strategi yang dilakukan oleh purnawirawan dalam memenangkan pemilu legislatif dengan pola "*klientelisme iterasi*" dan "*klientelisme personalistik*", pilihan pada pola tersebut karena purnawirawan memiliki jaringan kuat yang terbentuk saat bertugas di militer, dan bangunan jaringannya sangat kokoh karena proses pembentukannya lama. Pola ini juga dilakukan karena sangat efektif dalam mensosialisasikan diri, selain itu dapat meminimalisir biaya politik. Masuknya purnawirawan dalam politik lokal tidak ada hubungannya dengan instansi militernya sebelumnya, akan tetapi purnawirawan menggunakan kekuatan jaringan yang pernah dibuatnya saat di militer sebagai kekuatan dan strategi pemenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abercrombie, Hill, Stephen, Turner Bryan Sl. (1984). "*Dictionary of Sociology*". Middlesex : Penguin.

Aspinall, Edward. (2015). "*Money Politics : Patronage and Clientelism in Southeast Asia*". ANU Research Publications.

Aspinall dan Mada Sukmajati. (2015). *Politik Uang di Indonesia, patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta : PolGov.

- Becker, William R. (2001). *Retired Generals and Partisan Politics: Is A Time Out Required? Strategy Research Project*. Pennsylvania: US Army War College, Carlisle Barracks
- Creswell, John W & Pianno Clark. (2007). *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks : Sage
- David, Fred R. (2011). *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fandi, Tjiptono .(2006). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Andi.
- Janowitz, Morris. 1960. *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: The Free Press.
- Lindawati, D, sanur .(2014). *Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014*. Jurnal Politica Vol 4 No 2, November 2013 (287-312).
- Marijan, Kacung (2010) *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta : Prenada Media Group
- Maslow, Abraham H. (1994). *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT PBP, Jakarta.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT, Remaja Rosdakarya .
- Miles, M, Huberman, M., & saldana, J. (2014). *Qualitative data Analysis : A Methods Sourcebook* (3rd Ed) New York : Sage Publications, Inc.
- Michael A.,R, Stoner, J.A.F, Freeman R.E dan Gilbert D.R .(2005). *Strategi Manajemen*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Muno, Wolfgang. (2010). *Conceptualizing and Measuring Cilentelism*. Hamburg : GIGA German Institute of Global and Area Studies.
- Nursal, Adnan. (2004). *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pearce II, John A, Richard B. (2008). *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta : Salemba Empat
- Rumah Pemilu 2014. “*Gambaran Singkat PemilihanUmum 2014*”. diakses pada 10 Oktober 2018 <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>. .
- Schroder, Peter. 2009. *Strategi Politik*, Friedrich Naumann Siftung Fur die Freiheit, Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo

Taylor, S.J., Bogdan, R., & De Vault, M.L (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods : A Guidebook and Resource* (4th Ed). New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.

Tim Prima Pena, (2006), *Kamus Ilmiah Populer : Referensi Ilmiah, Idiologi, Politik, Hukum, EkonoI, sosial, Budaya dan Sains*, Jakarta : Gitamedia Press.

Tomsa, dirk dan Andreas, Ufen. (2012). *Party Politics in Southeast asia : Clientelism and Electoral Competitions in Indonesia, Thailand and the Philippines*. London : Routledge.

## **B. Jurnal**

Anggoro, Teguh. *Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No 1 Juni (2019).

Alam, Maburur. (2016). *Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan terpilih dalam Pemilihan Legislatif 2014 (Studi Pada Kantor DPRD Kota Makassar)*, Jurnal Tomalebbi, Volume III, Nomor 2, Juni 2016 hal 146-152.

Hanif, Hasrul .(2009). . “Politik klientalisme baru dan dilema demokratisasi di Indonesia”. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, Vol 13, Nomor 3, Maret 2009 (257-390).

Mahmud, Insan. (2018). *Strategi Pemenangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009*. Jurnal Politika, Volume 9 No 1 April 2018.

Soesilo, Arie. S. (2014), *Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalm Politik Relasi Sipil – Militer Pasca Reformasi TNI*. Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 19, No 2 Juli 2014 : Pusat kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI (195-230).

Yanto. (2014). *Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif Incumbent Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Partai Golkar di kabupaten Muko-Muko)*. Jurnal Professional FIS UNIVED Vol 1 No 2 Des 2014 (61-72)

## **C. Tesis dan Skripsi**

Ali, Azwar. (2015). *Strategi Pemenangan Partai Politik dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2014 (Studi Pada DPC PPP Kab Sumenep)*. Tesis Universitas Muhamadiyah Malang.

Mubin, Muhammad Fathul. (2015). *Strategi Pemenangan Pemilu, Studi Tentang Strategi Tim Sukses Hanafi Rais Dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia Tahun 2014*. Skripsi, FISIPOL UGM 2015

Setiawan, Ryan Bagus. (2017). *Strategi dan Pola Jaringan Klientelisme dalam Pemenangan Pasangan Petahana Idza Priyanti dan Narjo Pada Pilkada Brebes Tahun 2017*. Tesis, FISIP UNSUD.

